

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Otonomi daerah di Indonesia dimulai berdasarkan keputusan Presiden RI Nomor 11 Tahun 1996, dan untuk tiap-tiap Provinsi yang ada di Indonesia dimulai tahun 2000 sejak adanya UU No. 22 tahun 1999. Sumatera Utara adalah salah satu provinsi di Indonesia yang mendapatkan otonomi daerah. Otonomi daerah di Sumatera Utara memungkinkan provinsi ini memiliki kewenangan dalam mengelola sejumlah urusan, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, keuangan, dan lain-lain, sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah tersebut. Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundangan. Otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggungjawab kepada daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. Oleh karena itu, daerah dituntut untuk menggali potensi daerahnya agar dapat memberikan penghasilan dalam bentuk Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-

lain pendapatan asli daerah yang sah yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Pendapatan Asli Daerah idealnya menjadi sumber utama pendapatan lokal. Sumber pendapatan lain relatif fluktuatif dan cenderung di luar kendali atau kewenangan pemerintah daerah. (Miragustina Mayza, Raja Masbar, 2015)

Salah satu provinsi di Pulau Sumatra yang memiliki jumlah penduduk terbesar ialah Sumatera dengan hasil sensus sebesar 12,98 juta jiwa pada tahun 2010. Kepadatan penduduk Sumatera Utara pada tahun 1990 adalah 143 jiwa per km<sup>2</sup> dan pada tahun 2010 meningkat menjadi 178 jiwa per km<sup>2</sup> dengan aju Pertumbuhan Penduduk dari tahun 2000-2010 sebesar 1,10 persen. Berdasarkan sensus penduduk tahun 2020, penduduk Sumatera Utara bertambah menjadi 13.937.797 jiwa, dengan kepadatan penduduk 191 jiwa/km<sup>2</sup>, dan per 31 Desember 2022 berjumlah 15.372.437 jiwa.

Banyaknya jumlah penduduk yang bertambah setiap tahunnya di Sumatera Utara, menjadikan Sumatera Utara sebagai provinsi terpadat di antara wilayah Sumatra lainnya. Hal ini merupakan salah satu potensi yang dimiliki untuk selanjutnya dikelola dengan baik. Hak dan kewajiban serta tanggung jawab untuk mengelola potensi suatu wilayah merupakan salah satu peran pemerintah dalam menjalankan otonomi daerah.

Namun potensi yang dimiliki oleh Provinsi Sumatera Utara berbanding terbalik dengan kemampuannya dalam menghasilkan PAD yang buktikan oleh data berikut,



**Gambar 1. 1 Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Sumatera Utara, tahun 2017-2021**

Berdasarkan grafik diatas dapat diketahui bahwa selama 5 tahun terakhir kondisi PAD Sumatera utara mengalami kondisi naik turun. Diawali pada tahun 2017 sebesar Rp 718.429.781 mengalami kenaikan sebesar Rp 42.032.265 menjadi Rp 761.462.046 pada tahun 2018 pada 2019 terjadi penurunan sebesar Rp 64.074.218. Penurunan ini masih terus terjadi pada tahun 2020 hingga Rp 187.350.454. Hal ini terjadi karena adanya fenomena pandemi Covid-19 yang membuat perekonomian Sumatera Utara menurun sehingga perolehan pendapatan asli daerah juga ikut menurun, tetapi pada tahun 2021 terdapat kenaikan namun hanya sedikit yakni Rp 8.703.839. Pada peningkatan yang terjadi di tahun 2021 tersebut dikarenakan pemerintah sudah mulai beradaptasi dan mulai memberikan kebijakan-kebijakan yang dapat meningkatkan pendapatan walaupun belum maksimal setidaknya cukup baik dari pada tahun sebelumnya.



**Gambar 1. 2 Presentase Anggaran Pendapatan Sumatera utara 2021**

Berdasarkan presentase diatas dapat dilihat bahwa pendapatan asli daerah Sumatera utara sangat amat kecil dan Sumatera utara masih memiliki ketergantungan terhadap dana transfer dari Negara hal ini di sebabbkan karena terjadinya sebuah fenomena covid-19. Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa pendapatan yang bias dihasilkan oleh Sumatera utara sebesar 17% dalam bentuk pendapatan asli daerah, transfer Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 48%, transfer Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar 3%, transfer Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik sebesar 6%, transfer Dana Alokasi Khusus (DAK) non fisik sebesar 12%, transfer Dana Insentif Daerah (DID) sebesar 1%, dan transfer Dana Desa sebesar 9%, berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa sumatera utara masih memiliki ketergantungan yang cukup besar dari dana transfer dan belum bisa untuk menjadi daerah yang mandiri, namun beberapa factor yang dapat mempengaruhi PAD di provinsi Sumatera utara



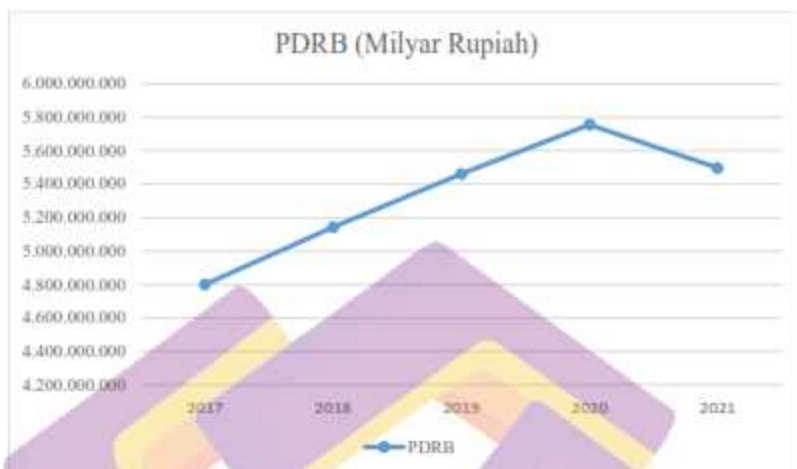
meningkat akan di teliti dalam penelitian ini, yakni berdasarkan factor Produk Domestik Regional Bruto dan Belanja Daerah.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi PAD di provinsi Sumatra Utara yakni Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Belanja Daerah. Produk Domestik Regional Bruto adalah adalah nilai pasar total output suatu negara. PDRB adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu daerah dalam jangka waktu tertentu (satu tahun) (Iman et al., 2019). PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) harga berlaku adalah salah satu metode yang digunakan dalam mengukur kinerja ekonomi suatu wilayah atau daerah. Dalam metode ini, data ekonomi diukur dengan mempertimbangkan harga aktual dari barang dan jasa yang dihasilkan dan dikonsumsi di wilayah tersebut pada tahun yang bersangkutan. PDRB harga berlaku mencerminkan keadaan ekonomi sebagaimana adanya pada saat itu. Ini dapat memberikan pandangan yang lebih akurat tentang sektor-sektor yang menghasilkan nilai tambah nyata dalam wilayah tersebut.

Harga berlaku pada PDRB mencakup efek inflasi, yang penting untuk memahami perubahan nilai sebenarnya dari produksi dan pendapatan suatu wilayah dari tahun ke tahun, dengan menggunakan metode harga berlaku memberikan gambaran yang lebih baik tentang bagaimana perubahan harga di pasar dapat mempengaruhi nilai tambah dan pertumbuhan ekonomi. Penggunaan harga berlaku memungkinkan perbandingan yang lebih baik antara wilayah-wilayah yang memiliki struktur harga yang berbeda.

Keterkaitan antara PDRB sebagai tolak ukur pendapatan masyarakat dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD), semakin tinggi pendapatan seseorang maka akan semakin tinggi pula seseorang membayar pajak (ability to pay) yang ditetapkan pemerintah. Pada tingkat distribusi pendapatan tertentu yang tetap, semakin tinggi PDRB per kapita riil suatu daerah, semakin besar kemampuan masyarakat daerah untuk membiayai pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan pemerintah (Miragustina Mayza, Raja Masbar, 2015).

Secara spasial, struktur perekonomian Pulau Sumatera pada tahun 2021 masih didominasi oleh Provinsi Sumatra Utara dengan kontribusi sebesar 23,37 persen, Provinsi Riau sebesar 22,92 persen dan Provinsi Sumatra Selatan sebesar 13,36 persen. Setelah hampir 2 tahun pandemi Covid-19 melanda, perbaikan perekonomian mulai terjadi di semua provinsi dengan level pertumbuhan yang berbeda-beda. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 5,05 persen, diikuti oleh Provinsi Jambi sebesar 3,66 persen dan Provinsi Sumatra Selatan sebesar 3,58 persen. Pertumbuhan Provinsi Sumatra Utara menempati posisi terakhir dari 10 provinsi di Pulau Sumatera yaitu sebesar 2,61 persen. Hal ini dibuktikan oleh data perkembangan PDRB Provinsi Sumatra Utara yang memiliki tren yang terus meningkat hingga tahun 2020 lalu menurun di tahun 2021,



**Gambar 1. 1 Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Sumatra Utara, tahun 2017-2021**

Berdasarkan grafik diatas, selama 2017-2022 PDRB atas dasar harga konstan 2010 menunjukkan pertumbuhan yang positif namun pada tahun 2020 mengalami kontraksi 2017 sampai tahun 2021. Diawali pada tahun 2017 sebesar Rp 4.800.360.189 mengalami kenaikan sebesar Rp 342.389.211 menjadi Rp 5.142.749.400 pada tahun 2018, pada 2019 naik sebesar Rp 319.291.000, manjadi Rp 5.462.040.400 dan kenaikan yang terakhir yaitu terjadi pada tahun 2020 sebesar Rp 294.938.900, menjadi Rp 5.756.979.300. Selanjutnya pada tahun 2021 terjadi penurunan sebesar - Rp 259.074.900 menjadi Rp 5.497.904.400. Secara umum kinerja ekonomi tahun 2021 menunjukkan pergerakan melambat dibandingkan tahun 2017. Hal ini disebabkan pandemi covid19 Pada tahun 2021 (Statistik, 2018).

Faktor berikutnya yang mempengaruhi PAD adalah belanja daerah. Menurut Undang-undang No,33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan

pemerintah pusat dan pemerintah daerah, belanja daerah adalah kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah dikelompokkan menjadi dua yaitu belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Kelompok belanja tidak langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari, belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga. Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal. (Iman et al., 2019)

Belanja daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan propinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan social. (Widjajakoesoema, 2017).





**Gambar 1. 1 Perkembangan Belanja Daerah Sumatra Utara, tahun 2017-2021**

Berdasarkan tabel diatas dimana kondisi belanja daerah selama 5 tahun terakhir, tingkat belanja daerah sumatra utara mengalami fluktuasi juga, sebagai contoh tahun 2017 tingkat belanja daerah sebesar Rp 43.311.662.006, pada tahun 2018 mengalami penurunan yang cukup signifikan yakni sebesar Rp 7.998.326.759 menjadi Rp 35.313.335.247 selajutnya pada tahun 2019 terjadi peningkatan belanja daerah yang sangat signifikan yaitu sebesar Rp 11.149.311.522 menjadi Rp 46.462.646.769, pada tahun 2020 kembali mengalami penurunan namun tidak terlalu besar yaitu Rp 464.052.028 menjadi Rp 45.998.594.741, dan pada tahun 2021 kembali mengalami penurunan sebesar Rp 553.266.295 menjadi Rp 45.445.328.446.

Beberapa penelitian banyak yang mengkaji tentang faktor yang mempengaruhi pendapatan asli daerah, namun masing-masing peneliti memiliki karakteristik tersendiri terkait tema tersebut. Banyak penelitian yang meneliti

tentang pengaruh PDRB terhadap PAD namun menggunakan PDRB menurut harga konstan sedangkan pada penelitian ini yang sama-sama menggunakan PAD sebagai variabel dependent namun untuk penggunaan variabel independent yaitu menggunakan PDRB atas dasar harga berlaku dan belanja daerah dan akhirnya mendapatkan kesimpulan baru yang dimana pada penelitian terdahulu rata-rata PDRB selalu berpengaruh positif terhadap PAD namun pada penelitian kali ini didapatkan hasil yang sebaliknya yang dimana PDRB berpengaruh negatif pada PAD.

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan diatas bahwasannya ada keterkaitan antara pengaruh PDRB dan belanja daerah yang sejalan dengan peningkatan hasil output atau pendapatan asli daerah. Hal inilah yang selanjutnya akan dikaji dalam penelitian terkait pengaruh PDRB dan belanja daerah terhadap pendapatan asli daerah Sumatra utara.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Tahun 2021 pada saat terjadinya pandemi *Covid-19* di Indonesia yang dimana tingkat yang terkena dampak tersebut dalam kondisi cukup tinggi. Akibat dari pandemi *Covid-19* ini mengakibatkan sektor ekonomi mengalami gangguan salah satunya menurunnya tingkat pendapatan asli daerah. Dimana kondisi pendaatan asli daerah mengalami penurunan yang cukup besar, dalam hal ini pemerintah perlu menjaga stabilitas faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan asli daerah di antaranya yaitu PDRB dan belanja daerah.

Berkaitan dengan latar belakang penelitian tentang Pengaruh PDRB terhadap pendapatan asli daerah di provinsi Sumatra utara, maka masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap pendapatan asli daerah di provinsi Sumatera utara?
2. Bagaimana pengaruh belanja daerah terhadap pendapatan asli daerah di provinsi Sumatera utara?
3. Bagaimana pengaruh variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan belanja daerah secara bersama-sama terhadap pendapatan asli daerah di Sumatera Utara?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian tentang Pengaruh PDRB dan belanja daerah terhadap pendapatan asli daerah di provinsi Sumatera utara sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis seberapa besar pengaruh PDRB terhadap pendapatan asli daerah di provinsi Sumatra utara.
2. Untuk menganalisis seberapa besar pengaruh belanja daerah terhadap pendapatan asli daerah di provinsi Sumatra utara.
3. Untuk menganalisis variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan belanja daerah terhadap pendapatan asli daerah di provinsi Sumatra utara.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan baik langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

### 1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi pengembangan ilmu pengetahuan ekonomi khususnya dalam bidang keuangan daerah.

### 2. Manfaat praktis

#### a. Bagi Penulis

Penulis dapat mengembangkan pengetahuan akademis dan wawasan tambahan yang dapat membantu perkembangan serta menjadi alat perbandingan antara teori-teori yang sudah dipelajari di dalam perguruan tinggi, selain itu sebagai bahan tugas akhir dalam jenjang studi stasa satu (S1) di Universitas Amikom Yogyakarta.

#### b. Bagi Pemerintah

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan dan informasi bagi pemerintah untuk mengatasi permasalahan pendapatan asli daerah khususnya pada provinsi di indonesia yang pendapatan asli daerahnya yang masih rendah.

### 1.5. Sistematika Bab

Sistematika bertujuan untuk mempermudah penulis maupun pembaca untuk mencari materi yang dibutuhkan dalam tiap-tiap bab. Adapaun sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut :

## BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan mengenai latar belakang masalah yang menjadi dasar penulis untuk melakukan penelitian dan selanjutnya disusun rumusan



masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kemudian diakhiri dengan sistematika penulisan bab.

## **BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

Merupakan bab yang berisikan tinjauan pustaka dimana pada bab ini menjelaskan tentang teori-teori yang berhubungan dengan penelitian ini sehingga dapat menjadi penguat penelitian ini. adapun isi uraian dari bab 2 ini meliputi, landasan teori, peneliti terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis.

## **BAB III : METODOLOGI PENELITIAN**

Merupakan bab yang berisikan metodologi penelitian dimana bab ini menjelaskan mengenai metodologi penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini. adapun isi uraian dari bab 3 ini meliputi, objek penelitian, jenis dan sumber data penelitian, definisi operasional variabel dan teknik analisis data.

## **BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN BAB**

Merupakan bab yang berisikan tentang hasil pembahasan, dimana bab ini menjelaskan mengenai hasil pembahasan dari penelitian ini sesuai dengan judul penelitian ditegakkan. Adapun isi uraian dari bab 4 ini meliputi: hasil olah data yang sekaligus berisikan interpretasi dari olah data yang dihasilkan.

## **V : PENUTUP**

Merupakan bab yang berisi penutup. Adapun isi dari uraian bab 5 yaitu kesimpulan yang didapat dari penelitian ini berdasarkan perolehan hasil pembahasan yang didapatkan dan saran yang ditulis berdasarkan kesimpulan yang didapatkan.